

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Sampai dengan

Triwulan II tahun 2024 II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD..... II-11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan

Fungsi Sekretariat DPRD..... II-16

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB IV PENUTUP..... IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kalender Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Tahun 2024..... I-2

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024 II-4

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten
Lima Puluh Kota II-12

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-20

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... III-2

Tabel 3.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Jumlah
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2024..... III-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024, Sekretariat DPRD melakukan Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman dengan pasal 359 Bagian Keenam Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD sebagai berikut :

- I. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
- II. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja
- III. Penetapan Perubahan Renja Sekretariat DPRD

I. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Perumusan rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD
2. Penyajian rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD

Adapun jadwal penyusunan perubahan renja Sekretariat DPRD disajikan pada table 1.1

Berikut ini :



Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024																																			
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja																																				
1	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024																																				
2	Verifikasi rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 oleh Bapelitbangda																																				
3	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 setelah Verifikasi																																				
B	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2024																																				
1	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang PerubahanRKPD Tahun 2024																																				
C	Penetapan Perubahan Renja Sekretariat DPRD																																				
1	Penetapan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Daerah																																				
2	Penyelesaian Dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 dan menyampaikan ke Bappelitbangda																																				



Perubahan Rencana Kerja (Renja)
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun 2024

II. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. Penutup.

III. Penetapan Perubahan Renja Bappelitbangda

Perubahan Renja Bappelitbangda mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD, Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Perubahan Renja Sekretariat DPRD juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappelitbangda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2024.



Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPR Tahun 2024 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

IV. Penutup

Berisi ketentuan penutup.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Reviu ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan realisasi APBD. Selain itu, reviu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II serta memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tahun anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 2 program dan 17 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp.31.658.320.835. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renja Sekretariat DPRD pada triwulan II Tahun 2024 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sampai dengan akhir tahun 2024 direncanakan target capaian program sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai dengan triwulan II adalah sebesar 27.33%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 27.33. Adapun capaian masing-masing kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100 %, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 50 %, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 50 %.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah , direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 46.26%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 46.26%.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 33.33 %, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 33.33 %.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 16.67 %, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 16.67%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0.00 %, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0.00%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 41.67 %, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 41.67%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0.00% sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0.00%.
- h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 14.28%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 14.28%.
- i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2022 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 43.75%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 43.75%.

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Sampai dengan akhir tahun 2024 direncanakan target capaian program sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai dengan triwulan II adalah sebesar 17.65%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 17.65%. Adapun capaian masing-masing kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0%.
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0%.
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 16.67%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 16.67%.



- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 23.13%, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 23.13%.
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 38.89% sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 38.89%.
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 0% sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0%.
- g. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 20.83% sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 20.83%.
- h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, direncanakan target pencapaiannya sampai akhir tahun 2024 sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sampai triwulan II adalah sebesar 41.67% sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 41.67%.

Uraian di atas tergambar dalam Tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan : 2024

No	Sesuai Sasaran Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n- 1) / (tahun 2023)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi / Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi / Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir tahun Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d thn 2026		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya administrasi Perkantoran	0	180.034.093.721,00	109,93	35.472.714.686	100	18.361.445.047	15,76	3.575.677.451	11,56	3.070.938.667	42,67	6.646.616.118	152,60	42.119.330.804	37,73	142,97	
	Meningkatkan Pelayanan Prima	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.169.419.800,00	101,00	34.336.750	100	29.610.000	50	16.385.000	0	0	50	16.385.000	151	50.721.750	6,82	4,34	Set.DPRD
1	sda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	123.901.800	4	4.748.000	2 dok	4.230.000	1 dok	4.052.000	0 dok	0	1 dok	4.052.000	5 dok	8.800.000	0,63	7,10	Set.DPRD
2	sda	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6 dok	196.459.200	2	4.194.500	1 dok	4.230.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	4.194.500	0,33	2,14	Set.DPRD
3	Tenwujudnya Aparatur yang bersih dan bebas KKN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dok	164.514.900	2	5.255.500	1 dok	4.230.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	5.255.500	0,33	3,19	Set.DPRD
4	Meningkatkan Pelayanan Prima	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	6 dok	240.224.400	2	5.112.250	1 dok	4.230.000	1 dok	4.084.000	0 dok	0	1 dok	4.084.000	3 dok	9.196.250	0,50	3,83	Set.DPRD
5	Meningkatkan Pelayanan Prima	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dok	189.921.000	2	4.976.000	1 dok	4.230.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	4.976.000	0,33	2,62	Set.DPRD
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	127.299.100	2	5.519.750	1 dok	4.230.000	1 dok	4.165.000	0 dok	0	1 dok	4.165.000	3 dok	9.684.750	0,50	7,61	Set.DPRD
7	sda	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	127.099.400	2	4.530.750	1 dok	4.230.000	1 dok	4.084.000	0 dok	0	1 dok	4.084.000	3 dok	8.614.750	0,50	6,78	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	23.547.078.911	152,19	5.277.326.353	100	3.580.023.256	31,00	669.400.503	15,26	716.846.655	71,26	1.386.247.158	223,45	6.663.573.511	2,44	28,30	Set.DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	156 ob	21.406.874.169	468	4.834.578.403	364 ob	2.905.017.456	87 ob	548.740.503	87 OB	577.408.655	174 OB	1.126.149.158	642	5.960.727.561	411,54	27,84	Set.DPRD



2	sda	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72 dok	1.639.725.000	24	354.949.000	12 dok	609.555.700	3 dok	110.302.000	2 dok	132.856.000	5 dok	243.158.000	29	598.107.000	40,28	36,48	Set.DPRD
3	sda	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28800 SPJ	171.518.700	10.752	67.526.800	4.800 SPJ	46.800.000	563 SPJ	2.235.000	845 SPJ	6.582.000	1.408 SPJ	8.817.000	12.160 SPJ	76.343.800	42,22	44,51	Set.DPRD
4	sda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	6 dok	104.579.700	2	7.109.000	1 lap	4.230.000	1 lap	4.039.000	0 dok	0	1 dok	4.039.000	3 dok	11.148.000	50,00	10,66	Set.DPRD
5	Meningkatkan Pelayanan Prima	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18 kali	93.729.600	4	5.367.750	3 dok	4.230.000	1 kali	4.084.000	1 kali	0	2 kali	4.084.000	6 kali	9.451.750	33,33	10,08	Set.DPRD
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	78 dok	82.927.200	26	3.285.000	13 lap	5.371.500	3 lap	0	2 dok	0	5 la[0	31 lap	3.285.000	39,74	3,96	Set.DPRD
7	sda	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 dok	47.724.542	2	4.510.400	1 dok	4.818.600	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	4.510.400	33,33	9,45	Set.DPRD
		Kegiatan Administrasi Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	3.186.699.900	51,44	311.474.750	100	95.477.300	0,00	0,00	33,33	73.873.000	66,66	73.873.000	118,10	385.347.750	6,24	12,09	
1	Meningkatkan Pelayanan Prima	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	1.076.200.000	7	213.042.660	1 Paket	70.680.000	0 paket	0	1 paket	63.000.000	1 stel	63.000.000	8 stel	276.042.660	133,33	25,65	Set.DPRD
2	sda	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	48 org	766.000.000	4	74.900.900	8 org	12.774.800	0 org	0	0 org	0	0 org	0	4 org	74.900.900	8,33	9,78	Set.DPRD
3	Tenwujudnya Aparatur yang bersih dan bebas KKN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136 org	1.344.499.900	1	23.531.190	18 org	12.022.500	0 org	0	0 org	10.873.000	0 org	10.873.000	1 org	34.404.190	0,74	2,56	Set.DPRD
	sda	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	11.271.338.700	90,33%	2.388.051.334	100	826.551.100	10,00	6.205.000	6,67	100.669.100	96,42	106.874.100	97,32	2.494.925.434	0,96	22,14	Set.DPRD
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	5.427.266.000	7	1.303.499.079	1 Paket	382.815.000	0 paket	2.125.000	0 paket	21.126.300	0 Paket	23.251.300	7 paket	1.326.750.379	116,67	24,45	Set.DPRD
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	917.789.200	7	300.827.550	1 paket	72.321.600	0 paket	3.730.000	0 paket	7.000.000	0 paket	10.730.000	7 paket	311.557.550	116,67	33,95	Set.DPRD
3	sda	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1800 dok	313.186.000	100	18.628.375	300 dok	5.700.000	0 dok	0	0 dok	0	0 bk	0	100 bk	18.628.375	5,56	5,95	Set.DPRD
4	Tenwujudnya Aparatur yang bersih dan bebas KKN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 lap	2.016.922.500	24	540.311.830	12 lap	241.675.000	3 lap	0	2 lap	72.542.800	5 Lap	72.542.800	29 lap	612.854.630	40,28	30,39	Set.DPRD



5	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	lap	2.596.175.000	12	224.784.500	12	lap	124.039.500	3	lap	350.000	2	lap	-	5	Lap	350.000	17	lap	225.134.500	23,61	8,67	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100		2.479.534.400	100,13%	233.429.080	100		74.451.900	0		0	0		4.984.500	-		4.984.500	1,00		238.413.580	2,72	9,62	
1	sda	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	12	unit	2.479.534.400	4	233.429.080	2	unit	74.451.900	-	unit	0	-	unit	4.984.500	-	unit	4.984.500	4,00	unit	238.413.580	33,33	9,62	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		3.174.278.800	100,25%	812.163.551	100		411.429.600	25,00		900.000	16,67		49.413.000	41,67		50.313.000	42,67		862.476.551	1,54	27,17	
1	sda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	lap	133.000.000	24	11.845.000			5.100.000			900.000	2	lap	0	5	Lap	900.000	29		12.745.000	40,28	9,58	Set.DPRD
2	sda	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	144	lap	1.190.188.800	48	338.873.651			191.199.600			0	4		0	10	Lap	0	58		338.873.651	40,28	28,47	Set.DPRD
3	sda	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72	lap	1.851.090.000	24	461.444.900	12	lap	215.130.000			0	lap	2	49.413.000	5	Lap	49.413.000	29		510.857.900	40,28	27,60	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		16.806.565.000	100,21%	2.420.238.242	100		750.655.000	0		84.326.366	0		90.949.058	-		175.275.424	1,00		2.595.513.666	0,10	0,15	
1	sda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	96	unit	4.532.927.000	32	1.174.602.656	16	unit	405.017.000	0	unit	62.406.366	0	unit	43.524.058	0	unit	105.930.424	32	unit	1.280.533.080	33,33	28,25	Set.DPRD
2	sda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	24	unit	2.470.900.000	4	171.299.434	4	unit	109.395.000	0	unit	20.920.000	0	unit	12.625.000	0	unit	33.545.000	4	unit	204.844.434	16,67	8,29	Set.DPRD
3	sda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	unit	6.389.758.000	4	907.138.852	2	unit	191.763.000	0	unit	0	0	unit	34.800.000	0	unit	34.800.000	4	unit	941.938.852	33,33	14,74	Set.DPRD
4	sda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	unit	3.412.980.000	4	167.197.300	2	unit	44.480.000	0	unit	1.000.000	0	unit	0	0	unit	1.000.000	4	unit	168.197.300	33,33	4,93	Set.DPRD



	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100		2.303.111.700	0,00%	000	100		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00				
1	sda	Facilitasi Keprotokolan	Terlayannya protokol pimpinan	72 lap		674.138.000	0	000		lap	0	0 lap		0	0 lap	0	0 lap		0	0 lap	0	0,00	0,00	Set.DPRD	
2	sda	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Konferensi Pers	72 kali		371.794.700	0	000		kali	0	0 kali		0	0 kali		0	0 kali		0	0 kali	0	0,00	0,00	Set.DPRD
3	sda	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	-Terdokumentasinya kegiatan pimpinan	72 lap		1.257.179.000	0	000	lap		0 lap		0	0 lap		0	0 lap		0	0 lap		0,00	0,00	Set.DPRD	
			- Cetak foto kegiatan pimpinan	18000 lbr	0					lbr	0	0 lbr	0	0 lbr	0	0 lbr	0	0,00							
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100		110.539.620.510	99,46%	23.263.565.076	100		12.368.894.341	7,14	2.798.460.582	7,14	2.000.697.354	14,28	4.799.157.936	15,27	28.062.723.012	15,27	25,39				
1	sda	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	490 ob		108.687.790.510	980	23.006.300.076	490 ob		11.765.708.341	105 ob	2.798.460.582	105 ob	2.000.697.354	210 org	4.799.157.936	1.190 org	27.805.458.012	242,86	25,58	Set.DPRD			
2	sda	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	18 paket		1.473.830.000	3	213.745.000	3 paket		550.686.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	3 paket	213.745.000	16,67	14,50	Set.DPRD			
3	sda	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD	210 org		378.000.000	35	43.520.000	35 org		52.500.000	0 org	0	0 org	0	0 org	0	35 org	43.520.000	16,67	11,51	Set.DPRD			
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100		5.556.446.000	100,17%	732.129.550	100		224.352.550	18,75	0	25,00	33.506.000	43,75	33.506.000	44,75	765.635.550	1,64	13,78				
1	sda	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	72 dok		195.320.000	24	8.643.000	12 dok		0	3 dok	0	2 dok	0	5 bh	0	29 bh	8.643.000	40,28	4,43	Set.DPRD			
2	sda	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	72 lap		212.235.200	24	7.726.750	12 lap		10.810.000	3 lap	0	2 lap	0	5 lap	0	29 lap	7.726.750	40,28	3,64	Set.DPRD			
3	sda	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	72 lap		3.058.531.800	24	715.759.800	12 lap		189.908.000	3 lap	0	2 lap	33.506.000	5 lap	33.506.000	29 lap	749.265.800	40,28	24,50	Set.DPRD			
4	sda	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket		2.090.359.000	4	000	2 paket		23.634.550	0 paket	0	1 paket	0	1 paket	0	5 paket	0	41,67	0,00	Set.DPRD			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100		148.785.445.413	80,32%	30.108.650.539	100		13.254.363.700	6,04	3.017.016.977	14,13	2.470.633.901	17,65	5.460.831.478	18,45	35.569.482.017	9,31	0,24				
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100		37.348.615.000	40,51%	7.265.690.580	100		1.604.131.000	0,00	46.239.700	0	72.734.320	-	118.974.020	0,41	7.384.664.600	3,85	19,77				
1	sda	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dok		45.504.000	1	3.384.000	0 dok		0	0 dok	0	0 dok	0	0 SK	0	1 SK	3.384.000	16,67	7,44	Set.DPRD			



2	sda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	54 dok	35.635.434.800	17	7.206.544.330	9 dok	1.519.077.000	0 dok	46.239.700	0 dok	67.107.320	0 Rnpd	113.347.020	17 Rnpd	7.319.891.350	31,48	20,54	Set.DPRD
3	sda	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	30 dok	171.238.800	15	5.428.250	5 dok	7.103.000	0 dok	0	0 dok	0	9 PerU Uan	0	15 PerU Uan	5.428.250	50,00	3,17	Set.DPRD
4	sda	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	18 dok	642.728.500	3	43.249.000	3 dok	63.141.000	0 dok	0	0 dok	4.180.000	0 dok	4.180.000	3 dok	47.429.000	16,67	7,38	Set.DPRD
5	sda	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	6 dok	853.708.900	101	7.085.000	0 dok	14.810.000	0 dok	0	0 dok	1.447.000	0 dok	1.447.000	101 dok	8.532.000	1.683,33	1,00	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	5.797.355.035	101,00%	197.264.250	100	130.647.900	0	0	0	0	0	0	1	197.264.250	1,01	3,40	
1	sda	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 dok	228.588.147	4	37.000.000	2 dok	11.250.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	4 dok	37.000.000	33,33	16,19	Set.DPRD
2	sda	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	12 dok	226.737.739	4	17.130.000	2 dok	27.000.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	4 dok	17.130.000	33,33	7,55	Set.DPRD
3	sda	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 dok	4.670.191.987	2	25.603.050	1 dok	22.500.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	25.603.050	33,33	0,55	Set.DPRD
4	sda	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6 dok	226.631.917	2	46.682.700	1 dok	27.147.900	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	46.682.700	33,33	20,60	Set.DPRD
5	sda	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	6 dok	222.265.317	2	11.421.100	1 dok	19.500.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	11.421.100	33,33	5,14	Set.DPRD
6	sda	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6 dok	222.939.928	2	59.427.400	1 dok	23.250.000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	59.427.400	33,33	26,66	Set.DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	5.294.101.890	100,14%	124.532.250	100	49.848.000	-	6.278.000	16,67	6.207.400	16,67	12.485.400	17,67	137.017.650	17,67	2,59	
1	sda	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	18 dok	2.382.044.361	30	85.944.750	3 dok	41.725.000	0 dok	6.278.000	1 dok	6.207.400	1 dok	12.485.400	30 org	85.944.750	166,67	3,61	Set.DPRD
2	sda	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	18 dok	1.870.219.827	3	1.994.000	0 dok	0	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	3 lap	1.994.000	16,67	0,11	Set.DPRD
3	sda	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18 dok	417.046.765	3	1.874.500	0 dok	0	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	3 lap	1.874.500	16,67	0,45	Set.DPRD
4	sda	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	18 dok	49.259.674	3	2.308.000	0 dok	1.596.000	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	3 lap	2.308.000	16,67	4,69	Set.DPRD



5	sda	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	18 dok	48.919.674	3	3.766.000	0 dok	0	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	3 lap	3.766.000	16,67	7,70	Set DPRD
7	sda	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	18 dok	259.821.471	6	19.950.500	3 dok	2.718.000	0 dok	0	3 lap	0	3 lap	0	9 lap	19.950.500	50,00	7,68	Set DPRD
8	sda	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	18 dok	219.098.044	3	8.280.000	0 dok	0	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	3 lap	8.280.000	16,67	3,78	Set DPRD
9	sda	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6 dok	47.692.074	1	414.500	1 dok	3.809.000	0 dok	0	0 lap	0	0 lap	0	1 lap	414.500	16,67	0,87	Set DPRD
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	23.900.047.300	100,91%	2.286.729.650	100	1.576.839.800	4,80	4.882.400	18,33	95.537.000	23,13	73.600.000	24,14	2.360.329.650	9,41	#REF!	
1	sda	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	1 dok	-	0	000	1 dok	447.993.000	- dok	0	0 dok	0	- dok	0	0 dok	0	0,00	#DIV/0!	Set DPRD
2	sda	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	72 dok	19.286.055.800	24	1.792.776.050	12 dok	513.463.800	0 dok	0	5 dok	0	5,00 dok	0	29 dok	1.792.776.050	40,28	9,30	Set DPRD
3	sda	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	144 ob	806.997.900	0	000	0 ob	174.550.000	0 ob	0	0 ob	0	- ob	0	0 ob	0	0,00	0,00	Set DPRD
4	sda	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	576 ob	1.854.035.000	192	447.576.600	96 ob	17.700.000	24 ob	0	16 ob	73.600.000	40,00 ob	73.600.000	232 ob	521.176.600	40,28	28,11	Set DPRD
5	sda	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18 dok	1.882.960.000	6	45.780.000	3 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	- kali	0	6 kali	45.780.000	33,33	0,02	Set DPRD
6	sda	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	6 dok	69.998.600	1	597.000	0 dok	423.133.000	0 dok	0	0 dok	0	- dok	0	1 dok	597.000	16,67	0,01	Set DPRD
7	sda	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18 dok	7.402.134.000	6	1.478.203.300	3 dok	0	0 dok	4.882.400	1 dok	21.937.000	1,00 dok	26.819.400	7 dok	1.505.022.700	38,89	0,20	Set DPRD
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	9.832.587.700	96,36%	1.573.127.300	100	784.020.000	0	0	38,89	317.400.000	38,89	317.400.000	39,85	1.890.527.300	0,83	19,23	
1	sda	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	72 lap	2.240.225.300	24	101.687.100	12 lap	24.010.000	0 lap	0	5 lap	0	5 lap	0	29 kali	101.687.100	40,28	4,54	Set DPRD
2	sda	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	72 lap	1.282.125.000	22	66.982.500	12 dok	21.625.000	0 dok	0	5 dok	0	5 kali	0	27 kali	66.982.500	37,50	5,22	Set DPRD
3	sda	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	18 dok	6.310.237.400	5	1.404.457.700	3 dok	738.385.000	0 dok	0	1 dok	317.400.000	1 kali	317.400.000	6 kali	1.721.857.700	33,33	27,29	Set DPRD



	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	1.174.998.800	0,00%	3.324.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.324.000	0,00	0,28	
1	sda	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6 dok	1.030.498.800	1	000	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	0	16,67	0,00	Set DPRD
2	sda	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 lap	144.500.000	1	3.324.000	0 lap	0	0 lap	0	0 lap	0	0 lap	0	1 lap	3.324.000	16,67	2,30	Set DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	1.031.876.500	100,00%	21.067.100	100	0	12,50	0	8,33	0	20,83	0	22	21.067.100	21,83	2,04	
1	sda	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	6 dok	869.077.100	3	11.549.100	1 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 keg	0	3 keg	11.549.100	50,00	1,33	Set DPRD
2	sda	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	72 dok	162.799.400	24	9.518.000	12 dok	0	3 dok	0	2 dok	0	5 edisi	0	29 edisi	9.518.000	40,28	5,85	Set DPRD
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100	64.405.863.188	100,91%	18.636.915.409	100	9.108.877.000	25,00	2.959.616.877	16,67	1.978.755.181	41,67	4.938.372.058	42,68	23.575.287.467	4,89	36,60	
1	sda	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	72 dok	58.640.688.800	24	17.325.208.457	12 dok	8.230.738.000	3 dok	2.542.128.180	2 dok	1.839.610.116	5 dok	4.381.738.296	29 dok	21.706.946.753	40,28	37,02	Set DPRD
2	sda	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	6 dok	463.212.288	1	4.202.000	0 lap	0	0 lap	0	0 dok	0	0 dok	0	1 dok	4.202.000	16,67	0,91	Set DPRD
3	sda	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	72 dok	219.300.500	12	20.098.300	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 keg	0	12 keg	20.098.300	16,67	9,16	Set DPRD
4	sda	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	72 dok	5.082.661.600	13	1.287.406.652	12 dok	878.139.000	3 dok	417.488.697	2 dok	139.145.065	5 lap	556.633.762	18 lap	1.844.040.414	25,00	36,28	Set DPRD
	Jumlah				328.819.539.134,00		65.581.365.225		31.615.808.747		6.592.694.428		5.541.572.568		12.107.447.596		77.688.812.821			



Berdasarkan Tabel 2.1 di atas Realisasi yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II adalah 44.98 %. dimana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi Pencapaiannya sebesar 27.33% dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD realisasi pencapaiannya sebesar 17.65%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel 2.2. Namun demikian pencapaian indikator kerja utama Sekretariat DPRD dapat kami sajikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekre tariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		√				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	tercapai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan		√				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	tercapai



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETWA N	IKU KD	IKU PD (Sekre tariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)														
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan		√				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekre tariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD														
4	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			√			80%	80%	80%	80%	91.42%	94.02%	91.42%	91.42%	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	IKU SETW AN	IKU KD	IKU PD (Sekre tariat DPRD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dalam memfasilitasi kegiatan(%)														
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD			√			51	55	60	65	70	72.30	70	70	



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94.02% dan untuk nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD juga telah mencapai target 72.30.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholdersnya*.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah telah dilakukan secara maksimal.

2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap



jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pilihannya.
Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.
5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam



menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD.
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD:

Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan alat kelengkapan DPRD.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaannya pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesi yang dimiliki.
2. Tersedianya SOP dalam semua kegiatan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD
Tersedianya program pendidikan dan pelatihan baik untuk DPRD dan ASN yang memadai

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Lima Puluh Kota yakni membantu Kepala Daerah dalam memfasilitasi kebutuhan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka visi yang ingin dicapai atau diwujudkan yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Aparatur Profesional Dalam Mendukung Pelaksanaan



Tugas dan Fungsi DPRD “.

Sejalan dengan visi tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Struktur organisasi, jumlah pegawai, sarana dan prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja pejabat dan staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam RPJMD akan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sebagai perencanaan taktis strategis Sekretariat DPRD dalam mengelola potensi dan strategis yang dimiliki agar dapat dilaksanakan.
2. Untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan tugas kedinasan.
3. Sebagai rujukan dalam menyusun, Renja Perangkat Daerah dan RAPBD serta sebagai tolak ukur penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
4. Sebagai bahan evaluasi dalam mengukur pelaksanaan tugas dan kinerja.
5. Memberikan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan tanggungjawab organisasi Sekretariat DPRD sekaligus untuk dapat memberikan dorongan,



- motivasi, pengembangan insiatif dan kreatifitas guna mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas.
- 6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Meningkatkan profesionalisme Anggota DPRD dan penyediaan tenaga ahli.

Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

- 1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- 2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- 3. Optimasi dan peningkatan kwanritas dan kualitas sarana dan prasarana untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tidak ada penjelasannya.(tergambar dalam tabel 2.4)

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun rencana kerja dalam 2 program, 17 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan kegiatan sesuai Renstra Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengemban tugasnya selaku wakil rakyat. Dalam perjalanan waktu, adapun uraian rencana Sub kegiatan dan pendanaan dari masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SEKRETARIAT DPRD							25.813.960.855,00	31.615.808.747,00	31.658.320.835,00	5.844.359.980,00							72.134.970.072,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.813.960.855,00	31.615.808.747,00	31.658.320.835,00	5.844.359.980,00							72.134.970.072,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							25.813.960.855,00	31.615.808.747,00	31.658.320.835,00	5.844.359.980,00							72.134.970.072,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	16.851.699.955,00	18.361.445.047,00	18.403.957.135,00	20.793.315.478,00							37.645.015.433,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.419.000,00	29.610.000,00	29.610.000,00	28.191.000,00			-	-	-		325.177.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	126.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	126.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.278.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	126.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.305.100,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	126.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			56.912.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.681.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	315.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.915.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.237.786.164,00	3.580.023.256,00	3.622.535.344,00	384.749.180,00			-	-	-		4.712.976.734,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	2.313.686.164,00	2.905.017.456,00	2.947.529.544,00	633.843.380,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.245.429.321,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	874.210.000,00	609.555.700,00	609.555.700,00	-264.654.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			342.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4800 Dokumen	4800 Dokumen	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.503.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	315.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.915.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.838.300,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	315.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	3.915.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.799.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	1.500.000,00	5.371.500,00	5.371.500,00	3.871.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.342.900,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00	4.818.600,00	4.818.600,00	3.858.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.363.413,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	95.477.300,00	95.477.300,00	95.477.300,00	0,00			-	-	-		685.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.680.000,00	70.680.000,00	70.680.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			165.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	12.774.800,00	12.774.800,00	12.774.800,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	18 Orang	12.022.500,00	12.022.500,00	12.022.500,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	840.466.100,00	826.551.100,00	826.551.100,00	-13.915.000,00			-	- -	-		2.262.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	381.535.000,00	382.815.000,00	382.815.000,00	1.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.321.600,00	72.321.600,00	72.321.600,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			195.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	241.675.000,00	241.675.000,00	241.675.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			406.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.234.500,00	124.039.500,00	124.039.500,00	-15.195.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan				100 %	100 %	48.352.900,00	74.451.900,00	74.451.900,00	26.099.000,00			-	- -	-		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.352.900,00	74.451.900,00	74.451.900,00	26.099.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	416.959.600,00	411.429.600,00	411.429.600,00	-5.530.000,00			-	- -	-		538.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			38.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	196.729.600,00	191.199.600,00	191.199.600,00	-5.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	215.130.000,00	215.130.000,00	215.130.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik				100 %	100 %	709.338.000,00	750.655.000,00	750.655.000,00	41.317.000,00			-	- -	-		3.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	383.700.000,00	405.017.000,00	405.017.000,00	21.317.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	109.395.000,00	109.395.000,00	109.395.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	191.763.000,00	191.763.000,00	191.763.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	24.480.000,00	44.480.000,00	44.480.000,00	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	11.277.548.341,00	12.368.894.341,00	12.368.894.341,00	1.091.346.000,00			-	- -	-		24.072.035.899,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	11.225.048.341,00	11.765.708.341,00	11.765.708.341,00	540.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.775.795.899,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	550.686.000,00	550.686.000,00	550.686.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			226.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD				100 %	100 %	224.352.550,00	224.352.550,00	224.352.550,00	0,00			-	- -	-		1.199.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	189.908.000,00	189.908.000,00	189.908.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			657.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.634.550,00	23.634.550,00	23.634.550,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	8.962.260.900,00	13.254.363.700,00	13.254.363.700,00	25.527.693.739,00							34.489.954.639,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				100 %	100 %	1.598.177.000,00	1.604.131.000,00	1.604.131.000,00	5.954.000,00			-	- -	-		7.665.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	1.527.933.000,00	1.519.077.000,00	1.519.077.000,00	-8.856.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.103.000,00	7.103.000,00	7.103.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	63.141.000,00	63.141.000,00	63.141.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	14.810.000,00	14.810.000,00	14.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 %	100 %	130.647.900,00	130.647.900,00	130.647.900,00	0,00			-	- -	-		1.741.048.897,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.883.070,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.776.590,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.521.890.298,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.147.900,00	27.147.900,00	27.147.900,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.006.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.005.921,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.486.964,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan				100 %	100 %	41.725.000,00	49.848.000,00	49.848.000,00	8.123.000,00			-	-	-		1.959.006.262,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	3 Laporan	41.725.000,00	41.725.000,00	41.725.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			597.753.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			522.413.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			121.432.212,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			620.091.634,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			62.053.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3.809.000,00	3.809.000,00	3.809.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.753.940,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	100 %	938.785.000,00	1.576.839.800,00	1.576.839.800,00	638.054.800,00			-	-	-		6.241.666.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	447.993.000,00	447.993.000,00	447.993.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	488.122.000,00	513.463.800,00	513.463.800,00	25.341.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.501.755.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	174.550.000,00	174.550.000,00	174.550.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			319.791.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			468.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	258.413.000,00	423.133.000,00	423.133.000,00	164.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	100 %	391.355.000,00	784.020.000,00	784.020.000,00	392.665.000,00			-	-	-		1.783.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	24.010.000,00	24.010.000,00	24.010.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			483.223.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	21.625.000,00	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	345.720.000,00	738.385.000,00	738.385.000,00	392.665.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		770.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		305.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																			
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				100 %	100 %	5.861.571.000,00	9.108.877.000,00	9.108.877.000,00	3.247.306.000,00			-	-	-		14.024.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.022.936.000,00	8.230.738.000,00	8.230.738.000,00	3.207.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			119.509.280,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	838.635.000,00	878.139.000,00	878.139.000,00	39.504.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.010.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		J U M L A H							25.813.960.855,00	31.615.808.747,00	31.658.320.835,00	5.844.359.980,00							72.134.970.072,00		

Sedangkan rekapitulasi kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,
Jumlah Programdan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu(Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif(Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	17	31.658.320.835	2	17	74.091.973.072	
TOTAL		2	17	31.658.320.835	2	17	15.692.084.177	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat DPRD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat DPRD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHMAD ZAKRI